

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh negara dari penerimaan dan hibah yang berasal dari berbagai sumber. Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Pajak merupakan salah satu penyumbang penerimaan negara yang paling besar, maka dari itu Negara memberikan perhatian khusus pada sektor perpajakan.

Menurut Wiluyo (2012: 2) salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pemerintah tentunya ingin meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak. Kontribusi penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam negeri diharapkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan kontribusi penerimaan pajak dalam negeri Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Dalam Negeri Indonesia Tahun 2015-2018
(dalam miliar Rupiah)

| Jenis Penerimaan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PPh | 602.308,13 | 657.162,70 | 783.970,30 | 855.133,50 |
| PPN | 423.710,82 | 412.213,50 | 475.483,50 | 541.801,10 |
| PBB | 29.250,05 | 19.443,20 | 15.412,10 | 17.369,10 |
| Cukai | 144.641,30 | 143.525,00 | 153.165,00 | 155.400,00 |
| Pajak Lainnya | 5.568,30 | 17.154,50 | 8.700,00 | 9.691,80 |
| Tot al Penerimaan Pajak Dalam Negeri | 1.205.478,89 | 1.249.499,50 | 1.436.730,90 | 1.579.395,50 |

Sumber: www.bps.go.id, diakses pada 9 Februari 2019

Surya (2018) menyatakan bahwa pungutan terhadap masyarakat harus diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 Pasal 23(A) yang berbunyi, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.” Pungutan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. PPh merupakan sumber penerimaan negara yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan kepada orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan.

Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan bergantung pada penghasilannya, semakin besar penghasilan maka semakin besar juga pajak yang

akan dibayarkan perusahaan. Perhitungan pajak perusahaan menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Pajak akan mengurangi besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu sebagian besar perusahaan tidak secara sukarela membayar pajak, namun, perusahaan harus tetap membayar pajak karena sifatnya memaksa. Apabila tidak membayar pajak, perusahaan akan terkena sanksi yang dapat merugikan. Maka dari itu penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum dan regulasi yang berlaku. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu tindakan yang benar-benar legal (Zain, 2008, diacu dalam Ardyansyah, 2014) yang mana dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan. Pemerintah yang tentunya selalu berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak menemui kendala dari penghindaran yang dilakukan perusahaan.

Perusahaan dapat menghindari pajak dengan cara memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran aturan yang mengatur tentang pajak. Salah satu teknik *Tax Avoidance* yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan besarnya pajak yang akan menurunkan tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial

sebelum pajak (Richardson dan Lanis, 2007, diacu dalam Amelia, 2015). Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (Karayan dan Swenson, 2007, diacu dalam Ardyansyah, 2014). Tarif pajak efektif perusahaan sering digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan manajemen pajak yang diterapkan perusahaan.

Perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada PSAK dan peraturan perpajakan. Dalam menyiapkan laporan keuangan manajemen membutuhkan penilaian dan perkiraan. Hal ini memberikan manajemen fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangan. Fleksibilitas penyusunan laporan keuangan diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang penyajian laporan keuangan dengan pendekatan akrual (*accrual basis*). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1997 menerbitkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 yang mengatur tentang akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) yang mulai diterapkan pada tahun 2001. Sebelum diberlakukannya PSAK No. 46 tersebut, perusahaan hanya menghitung dan mengakui besarnya beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan saja tanpa menghitung dan mengakui pajak tangguhan (Surranggane, 2007: 78).

Pengakuan Pajak Tangguhan (*deffered tax*) dalam laporan keuangan perusahaan adalah satu hal yang relatif baru dalam dunia akuntansi di Indonesia. Walaupun opsi penerapan pajak tangguhan dalam Akuntansi Pajak Penghasilan telah diperkenalkan, akan tetapi masih banyak yang kurang memahami tentang pajak tangguhan tersebut baik dari segi pengertian atau pemahaman konseptual maupun aplikasi ke dalam laporan keuangan di Indonesia (Djamiluddin, 2008: 58).

Pada tanggal neraca, nilai tercatat aktiva pajak tangguhan perlu ditinjau kembali sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada PSAK No. 46. Hal ini berarti bahwa setiap tahun manajemen mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian yang bertujuan untuk menentukan saldo aktiva pajak tangguhan, di mana menurut Bauman *et al* (2001) penilaian tersebut bisa saja bersifat subjektif. Selain aktiva pajak tangguhan, beban pajak kini juga dapat digunakan dalam mendeteksi indikasi laba bersih. Beban pajak kini merupakan beban pajak penghasilan perusahaan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiskal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan. Adanya koreksi fiskal dalam penghitungan beban pajak kini akan menghasilkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Perbedaan tersebut dapat menginformasikan diskresi manajemen dalam menghasilkan laba.

Pendapatan pajak tangguhan adalah aset yang terjadi ketika perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif dan beban pajak berdasarkan akuntansi komersial lebih kecil daripada beban pajak berdasarkan undang-undang perpajakan (Wuluyo, 2011: 217). Pendapatan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode berikutnya karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan kompensasi untuk kerugian yang tersisa. Jika mungkin untuk merealisasikan manfaat pajak di masa depan, catat jumlah penerimaan pajak. Oleh karena itu, pertimbangan diperlukan untuk memperkirakan kemungkinan mewujudkan pendapatan pajak tangguhan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2014), Nilai tercatat dari penghasilan pajak tangguhan harus ditinjau pada tanggal laporan keuangan. Jika keuntungan

finansial mungkin tidak cukup untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak penghasilan tangguhan, perusahaan harus mengurangi nilai buku. Jika ada keuntungan finansial yang cukup, pengurangan harus disesuaikan lagi.

Keajiban untuk meninjau pada tanggal laporan keuangan, manajemen harus mengevaluasi setiap tahun untuk menentukan saldo aset pajak tangguhan dan cadangan aset pajak tangguhan, dan evaluasi manajemen untuk menentukan saldo pajak tangguhan cadangan aset pajak adalah subjektif (Suranggane, 2007: 81). Jika "laba finansial" lebih besar dari "laba akuntansi", pendapatan pajak tangguhan akan dihasilkan, jadi ini akan mempengaruhi laporan keuangan "laporan laba" dan "neraca". Dalam laporan saldo aset pajak tangguhan, itu akan muncul sebagai aset lancar. Laporan laba rugi pajak tangguhan akan digunakan sebagai pengurang beban pajak kini.

Penelitian Enggun Gunawan (2016), hasil dari penelitian ini adalah hasil uji t menyatakan bahwa hipotesis 1 diterima sedangkan hipotesis 2 tidak, yaitu laba bersih komersial secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap beban pajak kini sedangkan pendapatan pajak tangguhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap beban pajak kini. Selain itu hipotesis 3 diterima yaitu hasil uji F menyatakan bahwa laba bersih komersial dan pendapatan pajak tangguhan berpengaruh secara signifikan terhadap beban pajak kini yang diuji secara simultan.

Besarnya pajak juga dapat dipengaruhi oleh Pendapatan pajak tangguhan. Menurut Ardyansyah dan Zulaiha (2014), pendapatan pajak tangguhan adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa penghasilan yang

diterima oleh subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan. Perusahaan yang memiliki tingkat pendapatan pajak tangguhan yang tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi pula. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2015) menyatakan bahwa pendapatan pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyansyah dan Zulaiha (2014) yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan hasil (*research gap*) pada penelitian-penelitian sehubungan dengan tarif pajak efektif. *Research gap* ini menjadi salah satu alasan dilakukannya penelitian-penelitian lebih lanjut terkait tarif pajak efektif dengan variabel-variabel terkait yang dapat mempengaruhinya. Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Laba Komersial Dan Pendapatan Pajak Tangguhan Terhadap Beban Pajak” (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2018)”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan kewajibannya.
2. Adanya penurunan nilai pajak yang tidak wajar dalam laporan pajaknya.

3. Terdapat wajib pajak yang hanya membayar pajaknya setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah secara jabatan tanpa ada kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti S mendapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana laba komersial pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana pendapatan pajak tangguhan pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagaimana beban pajak pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
4. Seberapa besar pengaruh laba komersial terhadap beban pajak pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
5. Seberapa besar pengaruh pendapatan pajak tangguhan terhadap beban pajak pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui laba komersial pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pendapatan pajak tangguhan pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui beban pajak pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh laba komersial terhadap beban pajak pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pendapatan pajak tangguhan terhadap beban pajak pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis/ Akademis

Kegunaan teoretis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang beban pajak dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai beban pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis/ Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Kegunaan penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan dan menambah pengetahuan dalam hal pengaruh laba komersial dan pendapatan pajak tangguhan terhadap beban pajak.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam mengoptimalkan beban pajak pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia serta mengevaluasi kegiatan yang berhubungan dengan laba komersial dan pendapatan pajak tangguhan sehingga beban pajak menurun.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran selanjutnya dan bahan referensi bagi penelitian dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2020.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Kesq, et al. (2016:2) adalah sebagai berikut:

“Accounting consist of the three basic activities – it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”.

Sedangkan menurut Wld & Kwok dalam Sukrisno Agoes (2014: 1) yang di maksud dengan akuntansi yaitu

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Adapun menurut menurut Rudianto (2012: 15) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi terdiri atas proses identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian kegiatan transaksi suatu perusahaan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang dapat dapat di mengerti dan di pertanggungjawabkan.

2.1.1.2 Bidang Akuntansi

Dalam akuntansi terdapat bidang-bidang yang membahas lebih rinci mengenai akuntansi dalam suatu bidang. Menurut Zakiyudin (2013: 7) bidang-bidang akuntansi antara lain:

“1. Akuntansi Keuangan (*financial accounting*)

Berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini bertujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar seperti investor, badan pemerintah, dan pihak luar lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan yang perlu diperhatikan adalah keharusan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di suatu Negara. Standar akuntansi keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

2. Auditing (*auditing*)

Bidang ini berhubungan dengan proses pengauditan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Tujuan dari pelaksanaan audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat lebih dipercaya karena ada pihak lain yang memberikan pengesahan, untuk memastikan ketepatan terhadap prosedur yang berlaku, untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari suatu kegiatan. Objektivitas dan independensi adalah sesuatu yang mendasari pemeriksaan dalam melakukan pemeriksaan. Akuntan tunduk pada standar auditing dan kode etik akuntan dalam melaksanakan proses audit. Standar ini dinamakan Standar Akuntansi Publik (SAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

3. Akuntansi Manajemen (*management accounting*)

Beberapa manfaat dari akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas dan memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Trend baru dalam akuntansi manajemen adalah pengendalian perusahaan melalui proses aktivitas yang dijalankan (*activity based management*). Saat ini akuntan publik telah mengembangkan penyedia jasa konsultasi bisnis (*business consulting*) dan jasa konsultasi ekonomi dan keuangan (*economic and financial consulting*).

4. Akuntansi Biaya (*cost accounting*)
Bidang akuntansi ini erat kaitannya dengan penetapan dan kontrol atas biaya terutama berhubungan dengan biaya produksi dan distribusi suatu barang. Fungsi utama akuntansi biaya adalah mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisa data mengenai biaya-biaya baik biaya yang sudah maupun yang akan terjadi. Berguna bagi manajemen sebagai salah satu alat kontrol atas kegiatan yang sedang, telah dan perencanaan di masa yang akan datang.
5. Akuntansi Perpajakan (*tax accounting*)
Di karenakan tujuan akuntansi ini adalah untuk tujuan perpajakan, maka konsep tentang transaksi, kejadian keuangan, bagaimana mengukur dan melaporkannya ditetapkan oleh peraturan pajak. Peraturan pajak memiliki peran yang besar terhadap keputusan usaha yang dilakukan perusahaan. Seorang akuntan dapat berperan dalam perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan peraturan perpajakan, dan mewakili perusahaan di hadapan kantor pajak.
6. Penganggaran (*budgeting*)
Merupakan bidang yang berkaitan dengan penyusunan rencana keuangan dalam hal kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, menganalisis dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya”.

Sedangkan menurut Rahman Pura (2013: 4) bidang-bidang akuntansi di antaranya adalah:

- “1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/ manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang di buat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang serta analisa dan pengawasannya.
8. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”.

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Terdapat beberapa konsep mengenai teori keagenan. Salah satu konsep teori keagenan menurut Lukas Setia Atmaja (2008: 12) :

“Hubungan keagenan atau *agency relationship* muncul ketika satu atau lebih individu (majikan) menggaji individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan ini muncul antara : (1) pemegang saham (*shareholders*) dengan para manajer, serta (2) *shareholders* dengan kreditor (*bondholders* atau pemegang obligasi).”

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut Anthony dan Govindarajan dalam Sajian (2011: 10) adalah :

“Hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.”

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham Jensen dan Meckling

dalam Siagian (2011: 10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*).

Dari uraian di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa teori keagenan merupakan kontrak antara manajer dengan pemegang saham di mana pemegang saham mempekerjakan manajer sebagai *agent* untuk bertindak mewakili kepentingan pemegang saham.

2.1.3 Laba Komersial

2.1.3.1 Pengertian Laba Komersial

Laba komersial atau laba usaha merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja atas keberhasilan suatu perusahaan dalam bentuk suatu periode tertentu. Selain itu laba juga merupakan salah satu pos yang penting dalam laporan keuangan dan mempunyai manfaat yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Untuk mengetahui besarnya laba maka dapat dilihat pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, khususnya dalam laporan laba rugi perusahaan.

Dalam bidang akuntansi, laba merupakan selisih antara pendapatan dengan harga pokok penjualan, beban usaha serta kerugian-kerugian dan lain sebagainya. Laba dipengaruhi oleh dua bagian pokok yaitu pendapatan dan biaya. Pengertian laba dapat ditinjau dari sudut ilmu ekonomi, akuntansi dan perpajakan.

Menurut Belkaoui dalam Sofyan Syafri Hrahap (2008: 305) definisi tentang laba itu mengandung lima sifat, yaitu

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, yaitu timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut.
2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodik laba itu, artinya merupakan prestasi perusahaan itu pada periode tertentu.
3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan tersendiri tentang apa yang termasuk hasil.
4. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya histories yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu.
5. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching artinya hasil dikurangi biaya yang diterima/ dikeluarkan dalam periode yang sama.

Labanya bersih (*net profit*) adalah selisih antara seluruh pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Labanya merupakan suatu kelebihan pendapatan atau keuntungan yang layak diterima oleh perusahaan, karena perusahaan tersebut telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan lain pada jangka waktu tertentu. Informasi laba diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutupi biaya nonproduksi (J Wild, KR Subramanyan, 2010: 407).

Labanya Akuntansi (*accounting income*) atau disebut juga labanya komersial. Menurut PSAK No. 46 (Revisi 2015),

“Labanya akuntansi adalah labanya atau rugi selamanya satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Labanya akuntansi dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia diatur dalam SAK”

Labanya terdiri dari empat elemen utama yaitu pendapatan (*revenue*), beban (*expense*), keuntungan (*gain*), dan kerugian (*loss*). Definisi dari elemen-elemen labanya tersebut telah dikemukakan oleh *Financial Accounting Standard Board* dalam Sice, Sice dan Skousen (2008 : 230).

1. Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.
2. Beban (*expense*) adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.
3. Keuntungan (*gain*) adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.
4. Kerugian (*loss*) adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

Dalam akuntansi, untuk menghitung besarnya laba atau rugi suatu perusahaan, dapat dibuat suatu laporan laba rugi yang merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Dalam perhitungan tersebut ditentukan dua unsur, yaitu pendapatan dan unsur biaya. Secara umum ada dua konsep penyajian laporan laba rugi yaitu

1. Konsep laba operasi berjalan (*current operating concept*)
2. Konsep laba menyeluruh (*all inclusive concept*)

Konsep laba operasi berjalan mengacu pada pemanfaatan secara efektif sumber daya perusahaan dalam menjalankan usaha untuk menghasilkan laba, dalam pendekatan ini daftar laba rugi disusun hanya mengacu dan menggambarkan pendapatan dan beban yang berkaitan langsung dengan operasi normal perusahaan, sedangkan pos-pos luar biasa dilaporkan pada laba ditahan.

Konsep laba *all inclusive*, konsep ini melakukan pendekatan atas semua pos yang bersifat reguler dan non reguler disajikan di dalam laporan laba rugi, dengan kata lain konsep all inclusive berpendapat bahwa laba rugi yang dialami perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan operasi perusahaan harus diikutsertakan dan diperhitungkan dalam penetapan laba. Penyajian perhitungan laba rugi menurut standar akuntansi keuangan menganut *all inclusive concept*, yaitu menyajikan semua pos-pos operasi normal. Penyajian laba rugi ini harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu.

2.1.3.2 Pengertian Laba Fiskal

Penghasilan Kena Pajak/PKP (*taxable income*) merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagai mana yang diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, beserta peraturan pelaksanaannya. Menurut PSAK No. 46 (Revisi 2015),

“laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi)”.

Laporan keuangan komersial dibuat berdasarkan standar akuntansi harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak (Suandy, 2011: 81). Dalam menghitung penghasilan Kena Pajak, minimal ada lima (5) komponen yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak
3. Penghasilan yang pajak dikenakan secara final.
4. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
5. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

2.1.3.3 Pengakuan Pendapatan dan Pengakuan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Pengakuan, pengukuran dan pelaporan laba perusahaan dan komponennya merupakan salah satu tugas yang paling penting bagi akuntan, di mana para pemakai laporan keuangan harus mengambil keputusan dalam hubungannya dengan perusahaan-perusahaan atas penggunaan sumber daya perusahaan yang terkait operasinya di perhitungkan sedemikian rupa dalam laporan laba rugi, sehingga memberikan gambaran yang layak mengenai hasil perusahaan pada periode tertentu.

1. Pengakuan Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Defenisi pendapatan menurut IAI (23 : 06) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan aktivitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas

perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

Pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut:

1. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali.

2. Penjualan Jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode.

3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk:

- 1) Bunga, beban untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada perusahaan.
- 2) Royalti, beban untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer.
- 3) Dividen, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya

ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Pada umumnya imbalan tersebut adalah berbentuk kas atau setara kas.

Banyak masalah pengakuan pendapatan berkembang karena sifat transaksi maka pendapatan untuk suatu periode umumnya ditentukan tersendiri, terlepas dari beban dengan menerapkan prinsip pengakuan pendapatan, maka sesuai dengan prinsip ini pendapatan diakui:

- a. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan berarti tanggal pengiriman kepada langganan.
- b. Pendapatan dari jasa yang diberikan diakui ketika jasa-jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih.
- c. Pendapatan dari memberi kemungkinan bagi pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan, seperti bunga, sewa, dan royalty diakui pada saat berlalunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan.
- d. Pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan.

2. Pengakuan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi, pemanaan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Menurut IAI (2007: 18): Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi, misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh.

Kalau manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis. Misalnya pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap, goodwill, paten dan merek dagang. Beban ini dikenal dengan istilah penyusutan atau amortisasi.

2.1.3.4 Penyebab Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal

Menurut Zain (2011: 86) apabila ditelusuri lebih lanjut, ternyata penyebab perbedaan antara akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan tujuan utamanya, akuntansi keuangan memberikan informasi mengenai keuangan perusahaan kepada *stakeholder* dan menjadi tanggungjawab para akuntan untuk melindungi informasi agar tidak menyebarkan bagi para penggunanya. Sedangkan tujuan akuntansi perpajakan

juga system perpajakan adalah pungutan pajak yang adil. Oleh sebab itu tanggungjawab petugas pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan yang tidak wajar.

2. Prinsip akuntansi keuangan yang konservatif memungkinkan terjadinya kesalahan yang lebih cenderung *understated* pelaporan penghasilan atas aset. Untuk tujuan perpajakan, laporan keuangan yang *understated* tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan jumlah hutang pajak.
3. Akuntansi pajak sangat memperhatikan tingkat kepastian dari setiap transaksi keuangan. Sebagai contoh, dalam hal melakukan taksiran cadangan piutang ragu-ragu, akuntansi pajak tidak diperkenankan untuk membebankan piutang ragu-ragu tanpa secara hukum sah bahwa piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih.

Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal dalam hal untuk keperluan perpajakan, dibagi menjadi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Sedangkan untuk keperluan penerapan PSAK No. 46 yaitu mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan, perbedaan tersebut dibagi menjadi beda waktu (*temporary difference*) dan beda permanen (*permanent difference*).

Adanya perbedaan pengeluaran/beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham sekutu atau anggota.
3. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.

Adanya pendapatan yang tidak dapat ditambahkan dengan Penghasilan lainnya (dilakukan koreksi fiskal negatif) antara lain:

1. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara dan daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagian perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor.
2. Penghasilan bunga yang berasal dari deposito/tabungan baik yang ditempatkan di dalam negeri maupun diluar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang diluar negeri di Indonesia, termasuk jasa giro serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
3. Penghasilan yang diterima dari hasil sewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium gedung perkantoran, ruko, gudang dan industri.

2.1.4 Pendapatan Pajak Tangguhan

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Pajak Tangguhan

Wäl uyo (2012: 217) menyebutkan bahwa Pengertian Aktiva Pajak Tangguhan adalah “Aktiva yang terjadi apabila ada perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak.” Pendapatan pajak tangguhan disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Besarnya pendapatan pajak tagguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan *judgment* untuk menaksir seberapa mungkin pendapatan pajak tangguhan tersebut dapat direalisasikan.

Menurut Heskodalam Phillips (2003):

“bahwa perbedaan temporer dapat timbul dari perbedaan aturan pelaporan masing-masing sistem tetapi dapat juga karena GAAP (di Indonesia dikenal dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum) memberikan kebebasan yang lebih besar pada manajer dalam menentukan jumlah pendapatan dan beban untuk masing-masing periode dibandingkan dengan aturan perpajakan.”

Menurut Ikat an Akuntansi Indonesia (2014), nilai tercatat pendapatan pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal laporan keuangan. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai. Dengan adanya kewajiban untuk melakukan peninjauan kembali pada tanggal laporan keuangan, maka setiap tahun manajemen harus membuat suatu penilaian

untuk menentukan saldo aset pajak tangguhan dan pencadangan aset pajak tangguhan, sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan aset pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif (Suranggane, 2007: 81).

Menurut Timuri ana & Muhamad (2015) pengertian Aktiva pajak tangguhan adalah dampak akibat yang terjadi dikarenakan adanya PPh di masa yang akan datang namun dipengaruhi oleh adanya perbedaan waktu antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat digandakan pada periode yang akan datang.

Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebab adanya akibat perbedaan temporer dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan yang mengizinkan menurut PSAK 46 (2012. 46. 2). Dalam perbedaan temporer dalam aktiva pajak tangguhan perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya menurut PSAK 46 (2012. 46. 2).

Dengan diberlakukannya PSAK 46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aktiva pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aktiva pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba.

Pendapatan pajak tangguhan terjadi jika Laba Fiskal lebih besar dari Laba Akuntansi, sehingga akan berpengaruh terhadap laporan keuangan baik laporan Laba Rugi maupun Neraca. Dalam laporan Neraca Aset Pajak Tangguhan akan disajikan sebagai Harta Lancar (*Current Assets*). Sedangkan dalam laporan laba rugi pendapatan pajak tangguhan akan disajikan sebagai pengurang beban pajak kini.

2.1.4.2 Indikator Perhitungan Pendapatan Pajak Tangguhan

Pendapatan Pajak Tangguhan merupakan manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang (Wuluyo, 2008: 217).

Dalam penelitian ini Pendapatan Pajak Tangguhan dinyatakan dengan perubahan nilai aktiva pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ke waji ban Pajak Tangguhan} = \text{Tarif PPh} \times \text{Beda Waktu}$$

di mana:

Tarif PPh : Tarif PPh yang berlaku.

Beda Waktu : Perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiscal.

2.1.5 Beban Pajak Tangguhan

2.1.5.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan

Menurut Phillips, et al. (2003) dalam Yulianti (2004), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan dengan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan.

Beban pajak tangguhan merupakan akun yang muncul pada laporan laba rugi sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang memiliki koreksi negatif lebih besar dari koreksi positif. Beban pajak tangguhan juga merupakan nilai dari perubahan yang terjadi atas aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) dan kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) yang dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan tahun berjalan. Beban pajak tangguhan akan naik seiring dengan meningkatnya kewajiban pajak tangguhan bersih. Kewajiban tangguhan bersih tersebut diperoleh dari selisih antara kewajiban pajak tangguhan dengan aktiva pajak tangguhan (Djamiluddin, dkk., 2008).

Menurut Harnanto (2003: 115), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan

dengan PPh terutang menurut Purba (2009: 14), dapat dikategorikan dalam dua kelompok:

1. Perbedaan Permanen atau Tetap

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secara permanen.

2. Perbedaan Temporer atau Waktu

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang.

2.1.5.2 Ketentuan Pajak Tangguhan

Pada dasarnya bahwa PSAK No. 46 adalah cukup kompleks, karena untuk PSAK No. 46 secara utuh diperlukan juga pemahaman yang cukup atas UU PPh Indonesia. PSAK No. 46 mengatur mengenai tata cara pencatatan dan pengakuan atas pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan, dan bukan mengatur mengenai berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, maka untuk menghitung berapa besar jumlah pajak yang harus dibayar adalah berdasarkan ketentuan dalam UU Perpajakan.

Menurut Purba (2009: 68) penghitungan dasar pajak tangguhan:

“Hutang PPh dihitung berdasarkan laba akuntansi kena pajak. Akan tetapi, perlu disadari bahwa jumlah PPh yang nyata-nyata harus dibayar sesungguhnya adalah PPh terutang yang dihitung berdasarkan laba kena pajak, artinya biaya PPh bisa saja lebih kecil atau lebih besar dari hutang PPh. Untuk itu, diperlukan suatu penangguhan dari biaya PPh yang terlalu cepat diantisipasi atau biaya PPh yang ditunda pembayarannya. Karenanya, hutang PPh atau PPh yang harus dibayar/di setor pada negara, dihitung sebagai berikut:

| | |
|--|-------|
| Laba akuntansi sebelum pajak | xxxx |
| Beda waktu | |
| Biaya penyusutan = | (xxx) |
| Beban imbalan pasca kerja = | xxx |
| Jumlah beda waktu | xxxx |
| Beda tetap | |
| Pendapatan bunga = | (xxx) |
| Beban jaman = | xxx |
| Jumlah beda tetap | xxxx |
| Laba kena pajak | xxxx |
| Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan | xxxx |
| Laba kena pajak | xxxx |

Apabila penyusutan fiskal lebih kecil daripada penyusutan komersial akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan, sedangkan penyusutan fiskal lebih besar daripada penyusutan laba komersial akan menghasilkan beban pajak tangguhan. Besarnya pajak tangguhan dihitung dari besarnya penyusutan beda waktu dikalikan tarif pajak tangguhan. Berdasarkan Undang-Undang NO. 36 tahun 2008, tarif pajak tangguhan adalah 25%”

Purba (2009: 44) menjelaskan lebih lanjut mengenai ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat kewajiban dan aktiva pajak tangguhan :

| | |
|-------------------------------|-----|
| (D) Beban pajak tangguhan | xxx |
| (G) Kewajiban pajak tangguhan | xxx |
| (D) Aktiva pajak tangguhan | xxx |
| (G) Manfaat pajak tangguhan | xxx |

Berdasarkan pada penghitungan pajak penghasilan di atas, maka secara khusus penyajian dari perkiraan aktiva atau kewajiban PPh ditangguhkan berdasarkan PSAK No 46. Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar, maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ada tiga metode untuk mengalokasikan pajak (Kieso dan Weygant 2008: 76) yang dibahas oleh Zain (2010: 190) antara lain

1. *Deferred Method* (Metode Penangguhan)

Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (*income statement approach*) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari

pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan *matching principle* pada periode terjadinya perbedaan tersebut.

Namun, perkembangan dunia bisnis dan akuntansi telah sedemikian pesatnya sehingga muncul transaksi-transaksi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tetapi langsung diakui sebagai bagian dari ekuitas misalnya keuntungan atau kerugian dari surat berharga yang siap untuk dijual kapan saja. Apabila menggunakan pendekatan laba rugi transaksi seperti itu tidak dapat terdeteksi, sehingga pendekatan ini dipandang kurang relevan.

2. *Liability Method* (Metode Aktiva-Keajiban)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet approach*) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksi aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer. Pada metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan (*deferred tax*) atas konsekuensi pajak di masa mendatang berupa aktiva (keajiban) pajak tangguhan yang harus dilaporkan di neraca. Beban pajak tangguhan dilaporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negatif dari beban pajak tangguhan.

3. *Net of Tax method* (Metode Bersih dari Pajak)

Pada metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 46) di antara ketiga metode tersebut, hanya *deffered method* (metode pajak tangguhan) yang diperkenankan digunakan. Terpilihnya metode pajak tangguhan untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, karena secara umum dapat dikatakan bahwa metode ini memasukkan alokasi perbedaan temporer yang komprehensif dan bukan alokasi perbedaan temporer yang parsial. Selain dari pada itu, keunggulan dan kelemahan dari metode ini adalah:

- 1.3.1.1. Metode pajak tangguhan lebih menekankan pada pengukuran berapa besar penghematan pajak kini akibat perbedaan temporer tersebut yang dialokasikan pada periode mendatang, sedang di lain pihak metode kewajiban tekanannya pada berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan di masa mendatang untuk keperluan pajak penghasilan terutang.
- 1.3.1.2. Metode pajak tangguhan lebih objektif bila dibandingkan dengan metode kewajiban, karena tidak menggunakan estimasi atau sunsi berkenaan dengan waktu pemilihan Penghasilan Kena Pajak kini maupun pada periode pemilihan atau tarif pajak.
- 1.3.1.3. Baik metode pajak tangguhan maupun metode kewajiban menggunakan secara terpisah berkenaan dengan pajak tangguhan di neraca dan laba-rugi perusahaan dan tidak bergabung dalam nilai individu aset atau kewajiban, penghasilan atau biaya, seperti halnya metode pajak neto.
- 1.3.1.4. Kelemahan yang serius dari metode pajak tangguhan adalah tidak terdapatnya konsep mendasar atau teori yang rasional yang mempersalahkan kredit pajak tangguhan. Kredit tersebut tidak memiliki atribut yang lazimnya sebagai utang menurut akuntansi, dan seolah-olah merupakan klaim pemilik atas aset perusahaan. Para direksi lebih menfokuskan pada

masalah laporan laba-rugi dan objektivitas pengukuran beban pajak dalam metode pajak tangguhan, dibandingkan dengan perhatiannya terhadap neraca perusahaan dan konsistensi teori kredit pajak tangguhan dengan ekuitas lainnya.

2.1.5.3 Indikator Perhitungan Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiscal (Yulianti, 2004). Berdasarkan referensi dari penelitian yang dilakukan oleh Phillips et al. (2003) dalam Yulianti (2004) menyatakan bahwa rumus besaran *deferred tax expense* dinyatakan dengan besaran beban pajak tangguhan. Adalah sebagai berikut:

Penggunaan total aset disebabkan beban pajak tangguhan terjadi karena adanya perbedaan temporer sehingga biaya dan penghasilan tahun lalu yang baru diakui pada tahun ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen laba, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Sartika, Fat ahurrazak, Jack Febriand Adel, 2016 | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016 | X_1 : <i>Corporate Governance</i> X_2 : Profitabilitas Y: Tarif Pajak Efektif | Ukuran Dewan Komisaris Independen, proporsi Dewan Komisaris Independen, kepemilikan saham institusi onal, dan Komite audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif |
| 2 | M khael Yakobus Tent ua, 2019 | Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2015-2017 | X_1 : Ukuran Perusahaan X_2 : <i>Leverage</i> X_3 : Intensitas Aset Tetap X_4 : Intensitas Persediaan X_5 : Profitabilitas Y: Tarif Pajak Efektif | Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, sedangkan profitabilitas berpengaruh |
| 3 | Yeye Susilowati, Ratih W dyawati, Nur ai ni, | Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital</i> | X_1 : Ukuran Perusahaan X_2 : <i>Leverage</i> X_3 : Profitabilitas X_4 : <i>Capital</i> | Variabel ukuran perusahaan, capital intensity |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | <i>Intensity Ratio</i> Dan Komisaris Independen Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016) | <i>Intensity Ratio</i> X _s : Komisaris Independen Y : <i>Effective Tax Rate</i> | ratio dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap effective tax rate. Leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap effective tax rate. |
| 4 | Yuda Aditya Prakoso, 2018 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Y : Tarif Pajak Efektif | Variabel <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif. <i>Profitabilitas</i> dan intensitas aset tetap memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan variabel perputaran persediaan memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. |
| 5 | Lutfi M Baradja, Yuswar Zainul Basri, Vertari Sasm, | Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba | X ₁ : Beban Pajak Tangguhan X ₂ : Perencanaan Pajak X ₃ : Aktiva Pajak Tangguhan | Pajak tangguhan, perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|--|
| | 2017 | | Y : Manajemen Laba | memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen laba. |
| 6 | Enggun Guna wan, 2015 | Pengaruh Laba Komersial, Pendapatan Pajak Tangguhan Terhadap Beban Pajak Di Bursa Efek Indonesia | X ₁ : Laba Komersial X ₂ : Pendapatan Pajak Tangguhan Y : Beban Pajak | Laba bersih komersial berpengaruh signifikan, sedangkan pendapatan pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap beban pajak kini |
| 7 | Reny Kartika Sari, Zulai kha, 2015 | Pengaruh Komponen Aset Dan Kewajiban Pajak Tangguhan Terhadap Beban Pajak Kini Masa Depan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005- 2011) | X ₁ : Komponen Aset X ₂ : Kewajiban Pajak Tangguhan Y : Beban Pajak Kini Masa Depan | Aset pajak tangguhan dari imbalan pascakerja memiliki pengaruh negatif dan kewajiban pajak tangguhan atas depresiasi dipercepat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pajak kini. Sementara hasil untuk aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus ditanggung di bayar tidak mempengaruhi pajak kini |

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian didukung oleh teori umum (*grand theory*) yaitu teori *Agency theory* yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas atau otoritas untuk membuat keputusan. Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

Teori selanjutnya yang digunakan adalah perpajakan. Pajak adalah iuran wajib yang berasal dari subjek pajak dan ditujukan kepada negara. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan pajak bagi negara merupakan pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan pengelodaan beban pajak, baik secara legal maupun illegal.

Beban pajak tangguhan mencerminkan besarnya beda waktu yang telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu timbul karena adanya kebijakan akrual (*discretionary accruals*) tertentu yang diterapkan sehingga

terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak.

Perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada PSAK dan peraturan perpajakan. Dalam menyiapkan laporan keuangan manajemen membutuhkan penilaian dan perkiraan. Hal ini memberikan manajemen fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangan. Fleksibilitas penyusunan laporan keuangan diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang penyajian laporan keuangan dengan pendekatan akrual (*accrual basis*). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1997 menerbitkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan (PPH) yang mulai diterapkan pada tahun 2001. Sebelum diberlakukannya PSAK No. 46 tersebut, perusahaan hanya menghitung dan mengakui besarnya beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan saja tanpa menghitung dan mengakui pajak tangguhan (Surranggane, 2007: 78).

Berdasarkan definisi teori di atas maka laba komersial dan pendapatan pajak tangguhan berpengaruh besar terhadap beban pajak perusahaan.

2.3.1 Pengaruh Laba Komersial terhadap Beban Pajak

Poernomo dalam Lestari (2011) menyatakan bahwa laba komersial adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan lebih ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi, sedangkan laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan lebih ditujukan untuk menjadi dasar penghitungan PPh.

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan antara laba akuntansi (yaitu dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Harnanto, 2003: 115). Oleh karena itu, besar kecilnya laba yang diperoleh akan mempengaruhi beban pajak tangguhan yang harus dikeluarkan. Seperti pernyataan Enggun Guna wan (2015) dalam penelitiannya bahwa laba bersih komersial memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap beban pajak perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Pendapatan Pajak Tangguhan terhadap Beban Pajak

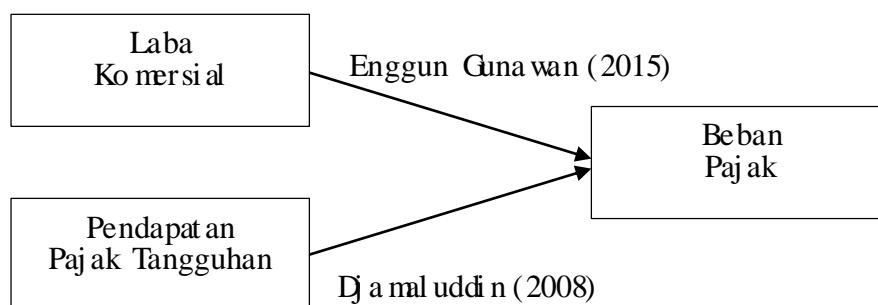
Semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba komersial) dengan laba fiscal menunjukkan bendera merah bagi pengguna laporan keuangan. Selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiscal mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan terjadinya aktiva pajak tangguhan (Suranggane, 2007: 78). Pendapatan pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiscal akibat perbedaan temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi dari laba fiscal mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang.

Selisih negatif antara laba akuntansi dan laba fiscal mengakibatkan terjadinya koreksi negatif yang menimbulkan terjadinya beban pajak tangguhan (Djamiluddin, 2008: 58). Beban yang besar akan menurunkan tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan, begitu pula sebaliknya beban yang sedikit akan menaikkan tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspektasikan adanya peranan pendapatan pajak tangguhan dalam perubahan beban pajak tangguhan. Jika jumlah

pendapatan pajak tangguhan semakin besar, maka semakin tinggi beban pajak tangguhan.

2.3.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan gambaran sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan teori yang ada, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H1: Terdapat pengaruh laba komersial terhadap beban pajak

H2: Terdapat pengaruh pendapatan pajak tangguhan terhadap beban pajak

H3: Terdapat pengaruh laba komersial dan pendapatan pajak tangguhan terhadap beban pajak

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, karena untuk menyajikan gambaran mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti serta untuk menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2017: 8), metode penelitian kuantitatif sebagai berikut:

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Menurut Sugiyono (2017: 35), metode penelitian deskriptif sebagai berikut:

“Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain”.

Tujuan dari metode deskriptif ialah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Sugiyono (2017: 37) penelitian verifikatif yaitu “metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis tidak atau diterima”.

Dalam penelitian ini, metode verifikatif digunakan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan pendapatan pajak tangguhan terhadap beban pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

3.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 3) objek penelitian adalah:

“Suatu atribut dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”

Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi objek penelitian adalah laba komersial dan pendapatan pajak tangguhan terhadap beban pajak. Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

3.3 Unit Penelitian

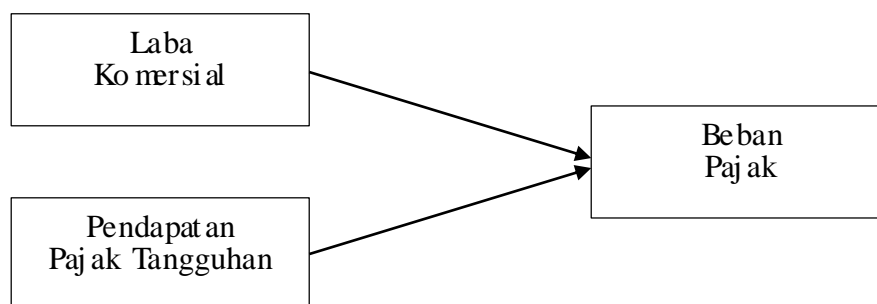
Pengertian Metode Penelitian menurut Sugiyono (2014: 2) adalah:

“Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Unit penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Peneliti melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan dalam situs www.idx.co.id

3.4 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan yaitu Pengaruh Laba komersial dan Pendapatan pajak tangguhan Terhadap Beban pajak, maka model penelitian ini dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Penelitian

3.5 Definisi Variabel dan Operationalisasi Variabel Penelitian

3.5.1 Definisi Variabel Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diambil yaitu pengaruh laba komersial (X₁) dan pendapatan pajak tangguhan (X₂) terhadap beban pajak (Y), maka pengelompokan variabel-variabel yang mencakup dalam judul tersebut terbagi menjadi dua variabel, yaitu

1. Variabel Bebas (Variable Independen) terdiri atas:
 - a. Laba komersial

Menurut J Wild, KR Subramanyan, 2010: 407) laba komersial adalah adalah selisih antara seluruh pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang terjadi dalam suatu periode akuntansi.

Indikator laba bersih komersial adalah

$$LB = \text{Pendapatan (-) Beban}$$

di mana:

Pendapatan : Seluruh pendapatan yang terjadi dalam suatu periode akuntansi.

Beban : Seluruh beban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi.

LB : Laba Bersih

LB : Pendapatan > Beban.

b. Pendapatan pajak tangguhan

Menurut Wiluyo (2008: 217):

“Pendapatan Pajak Tangguhan merupakan manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang”

Indikator perhitungan Pendapatan Pajak Tangguhan sebagai berikut:

$$\text{Ke waji ban Pajak Tangguhan} = \text{Tarif PPh} \times \text{Beda Waktu}$$

di mana:

Tarif PPh : Tarif PPh yang berlaku.

Beda Waktu : Perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiscal.

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat di penelitian ini adalah beban pajak, menurut Yulianti (2004), beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiscal.

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah

:

$$BPK = \text{Tarif PPh} \times \text{Laba bersih Fisikal (Penghasilan Kena Pajak)}$$

di mana:

Tarif PPh : Tarif PPh yang berlaku

PKP : Laba akuntansi setelah diadakan koreksi pendapatan dan biaya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku

BPK : Beban Pajak Kini

3.5.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Tujuan dari operasionalisasi variabel ialah untuk menentukan jenis dan indikator yang digunakan dalam penelitian. Proses ini juga dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistika dapat dilakukan secara benar. Sesuai dengan hipotesis yang penulis ajukan yaitu pengaruh laba komersial dan pendapatan pajak tangguhan terhadap beban pajak, maka terdapat tiga variabel dalam penelitian ini:

1. Laba komersial (X₁) sebagai variabel independen.
2. Pendapatan pajak tangguhan (X₂) sebagai variabel independen.
3. Beban pajak (Y) sebagai variabel dependen.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Konsep Variabel | Dimensi | Indikator | Skala |
|------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------|
| Laba komersial (1) | Laba komersial adalah selisih antara seluruh pendapatan (<i>revenue</i>) dan beban (<i>expense</i>) yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. J W d, KR Subramanyan, 2010: 407) | 1. Pendapatan 2. Beban | LB = Pendapatan (-) Beban | Rasio |
| Pendapatan pajak tangguhan (2) | Pendapatan Pajak Tangguhan merupakan manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang | 1. Tarif PPh 2. Beda Waktu | Ke waji ban Pajak Tangguhan = Tarif PPh x Beda Waktu | Rasio |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------|
| | Wäl uyo (2008: 217) | | | |
| Beban paj ak (Y) | Beban paj ak tanguhan (<i>deferred tax expense</i>) merupakan beban yang tmbul aki bat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiscal. Yulianti (2004) | 1. Tarif PPh 2. Laba bersih Fiskal 3. Penghasilan Kena Pajak | BP K = Tarif PPh x Laba bersih Fiskal (Penghasilan Kena Pajak) | Rasio |

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian

3.6.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017: 80) menyatakan bahwa populasi adalah:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa populasi bukan hanya manusia tetapi bisa juga objek atau benda-benda subjek yang dipelajari seperti dokumen dokumen yang dapat dianggap sebagai objek penelitian. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Jumlah populasi adalah sebanyak 156 perusahaan dan tidak semua populasi ini akan

menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut.

3.6.2 Sampel Penelitian

Teknik sampling menurut Sugiyono (2017: 81) adalah sebagai berikut:

“Teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan”.

Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Non Probability Sampling. Menurut Sugiyono (2017: 82) Probability Sampling adalah sebagai berikut:

“Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel”.

Non Probability Sampling Menurut Sugiyono (2017: 84) adalah sebagai berikut:

“Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kemungkinan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”.

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Non Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan menggunakan penelitian purposive sampling.

Menurut Sugiyono (2017: 85) pengertian purposive sampling adalah sebagai berikut:

“*purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan, oleh karena itu penulis memilih teknik purposive sampling dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
2. Perusahaan sektor manufaktur yang tidak terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Yahoo finance pada tahun 2016-2018.

Tabel 3.2 Tahap Penyelesaian Untuk Sampel Penelitian

| Keterangan | Jumlah |
|--|---------------|
| Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. | 156 |
| Di kurangi: | |
| 1. Perusahaan manufaktur yang tidak terpublis di internet secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. | (26) |
| 2. Perusahaan sektor manufaktur yang tidak terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Yahoo finance pada tahun 2016-2018. | (60) |
| Perusahaan manufaktur yang yang dipilih menjadi sampel | 70 |

Berdasarkan populasi penelitian di atas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang memiliki kriteria yaitu sebanyak 70 perusahaan manufaktur.

3.7 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.7.1 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017: 137) pengertian sumber data sebagai berikut:

“Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil penelitian dari pihak lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang diperoleh yaitu dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Data tersebut diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Adapun studi kepustakaan menurut Moch Nazir (2012: 111):

“Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan sumber data sekunder, di mana laporan keuangan tahunan diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id

3.8 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.8.1 Metode Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Data yang terhimpun dari hasil penelitian akan penulis bandingkan antara data yang ada di lapangan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2017: 147) analisis data adalah:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk hipotesis yang telah diajukan”.

3.8.1.1 Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017: 35) adalah:

“Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang

berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain”.

Analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis laba komersial, pendapatan pajak tangguhan dan beban pajak.

3.8.1.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh laba komersial dan pendapatan pajak tangguhan terhadap beban pajak. Pengertian penelitian analisis verifikatif menurut Sugiyono (2017: 37) yaitu

“Metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis tidak atau diterima.”

3.8.3.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear, maka peneliti tersebut harus memperhatikan asumsi-asumsi yang mendasari metode regresi. Apabila variabel telah memenuhi asumsi klasik, maka tahap selanjutnya dilakukan uji statistik. Uji statistik yang dilakukan adalah uji t dan uji f . Maksud dari uji t dan uji f adalah pengujian untuk membuktikan adanya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen ataupun untuk membuktikan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3.8.1.3.1 Uji Normalitas

Ghazali (2013: 160) menyatakan bahwa uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model sebuah regresi variabel dependen dan independen atau keduanya terdistribusi secara normal. Selain itu, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar data terdistribusi secara normal dalam variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Uji normalitas bisa dilakukan dengan melihat besaran kolmogorov smirnov. Data dapat dikatakan telah terdistribusi secara normal jika memenuhi kriteria:

1. Angka signifikan ($SI G$) $> 0,05$ maka data berkontribusi normal
2. Angka signifikan ($SI G$) $< 0,05$ maka data tidak berkontribusi normal.

3.8.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Santoso (2012: 234) mengatakan sebagai berikut:

“Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali”.

Jika terdapat korelasi yang sempurna di antara variabel independen sehingga nilai koefisien korelasi di antara sesama variabel independen ini sama dengan satu, maka konsekuensinya adalah:

1. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak stabil.
2. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

Se makin besar korelasi diantara sesama variabel independen, maka koefisien koefisien regresi se makin besar kesalahannya dan standar errornya se makin besar pula. Pendeteksian ada atau tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF. Apabila nilai VIF < 10 , maka model regresi bebas dari multikolinieritas.

3.8.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan uji korelasi spearman, yaitu mengkorelasikan variabel-variabel bebas dengan nilai residual model regresi. Jika signifikansi korelasi yang dihasilkan $> 0,05$, maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menunjukkan apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara residual pada periode waktu dengan residual pada periode waktu sebelumnya. Model regresi yang baik yaitu terbebas dari autokorelasi. Pendeteksian ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DWtest). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik Durbin-Watson (DW) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $DW < DL$ atau $DW > 4DL$, maka kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi.

2. Jika $DU < DW < 4 DU$ maka kesimpulan pada data tidak terdapat autokorelasi.
3. Jika $DL < DW < DU$ atau $4 DL < DW < 4 DL$, maka tidak ada kesimpulan yang pasti.

3.8.1.4 Analisis Korelasi

3.8.1.4.1 Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi bertujuan untuk menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara masing-masing variabel. Dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif atau negatif antara masing-masing variabel, maka penulis menggunakan rumusan korelasi pearson product moment. Adapun rumus yang digunakan menurut Sugiyono (2013: 248) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi *pearson*

x = Variabel independen

y = Variabel dependen

n = Banyak Sampel

Pada dasarnya, nilai dapat bervariasi dari -1 sampai dengan +1 atau secara sistematis dapat ditulis $-1 < r < +1$.

1. Bila $r = 0$ atau mendekati nol, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali sehingga tidak mungkin terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila $0 < r < 1$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan positif atau bersifat searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel independen terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel dependen.
3. Bila $-1 < r < 0$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan negatif atau bersifat berkebalikan, dengan kata lain kenaikan nilai-nilai variabel independen akan terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai variabel dependen atau sebaliknya.

Adapun untuk melihat hubungan atau korelasi, penulis menggunakan analisis yang di kemukakan oleh Sugiyono (2017: 184) sebagai berikut:

Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Korelasi

| Besarnya Pengaruh | Tingkat Hubungan |
|-------------------|------------------|
| 0,00 – 0,199 | Sangat Lemah |
| 0,20 – 0,399 | Lemah |
| 0,40 – 0,599 | Sedang |
| 0,60 – 0,799 | Kuat |
| 0,80 – 1,000 | Sangat Kuat |

3.8.1.4.2 Analisis Korelasi Simultan

Analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui besarnya atau kekuatan hubungan antara seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Menurut Sugiyono (2013: 256) koefisien korelasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{r^2_{yx_1} + r^2_{yx_2} - 2r_{yx_1} r_{yx_2} r_{x_1x_2}}{1 - r^2_{x_1x_2}}}$$

Keterangan:

- r_{12} = Korelasi antara variabel x_1 dan x_2 secara bersamaan dengan variabel
- r_1 = Korelasi *product moment* antara x_1 dengan y
- r_2 = Korelasi *product moment* antara x_2 dengan y
- r_{12} = Korelasi *product moment* antara x_1 dan x_2

Adapun untuk melihat hubungan atau korelasi, penulis menggunakan analisis yang di kemukakan oleh Sugiyono (2017:184) sebagai berikut:

Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Korelasi

| Besarnya Pengaruh | Tingkat Hubungan |
|-------------------|------------------|
| 0,00 – 0,199 | Sangat Lemah |
| 0,20 – 0,399 | Lemah |
| 0,40 – 0,599 | Sedang |
| 0,60 – 0,799 | Kuat |
| 0,80 – 1,000 | Sangat Kuat |

3.8.1.5 Analisis Linier Berganda

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh laba komersial dan pendapatan pajak tangguhan terhadap beban pajak.

Sugiyono (2013: 277) menyatakan bahwa:

“Analisis regresi ganda oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jika analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua”.

Analisis regresi linier berganda dapat dilakukan dengan menggunakan program *SPSS for windows*. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan model regresi (Multiple linear regression method).

Menurut Sugiyono (2013: 269) analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

Keterangan:

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = Konstanta, nilai Y bila $X=0$ (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila $b(+)$ maka naik, bila $b(-)$ maka terjadi penurunan.

X = Subjek variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

3.8.2 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah asumsi atau jawaban sementara mengenai suatu hal. Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).

Menurut Sugiyono (2017: 63), menyatakan bahwa:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Hipotesis nol (H_0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui korelasi dari ketiga variabel, dalam hal ini adalah Laba komersial dan Pendapatan pajak tangguhan terhadap Beban pajak menggunakan perhitungan statistik secara parsial (uji t) maupun secara simultan (uji f).

3.8.2.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2017: 184) rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah Data

Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan dengan tingkat kesalahan 0,05 atau 5% adalah sebagai berikut:

- H_0 diterima apabila: $sig > 0,05$
- H_0 ditolak apabila: $sig < 0,05$

Bila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen di nilai. Sedangkan penolakan H_0 menunjukkan terdapat pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Untuk pengujian parsial digunakan rumus sebagai berikut:

1. H_{01} : $\beta_1 = 0$: Laba komersial tidak berpengaruh signifikan terhadap beban pajak
2. H_{a1} : $\beta_1 \neq 0$: Laba komersial berpengaruh signifikan terhadap beban pajak
3. H_{02} : $\beta_2 = 0$: Pendapatan pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap beban pajak
4. H_{a2} : $\beta_2 \neq 0$: Pendapatan pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap beban pajak



Gambar 3.2 Uji t

3.8.2.2 Pengujian Secara Simultan (Uji f)

Uji f (uji simultan) adalah untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

variabel dependen. Uji statistik yang digunakan pada pengujian simultan adalah uji *f* atau yang biasa disebut dengan *Analysis of Variance (ANOVA)*.

Menurut Sugiyono (2017: 192) uji pengaruh simultan (*Ftest*) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R = Koefisien korelasi ganda

k = Banyaknya komponen variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Adapun kriteria yang digunakan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5% adalah sebagai berikut:

- H_0 diterima apabila: $sig > 0,05$
- H_0 ditolak apabila: $sig < 0,05$

Artinya apabila H_0 diterima, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan tidak signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya apabila H_0 ditolak menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Setelah mendapatkan nilai h ini, kemudian nilai dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Adapun digunakan adalah sebagai berikut:

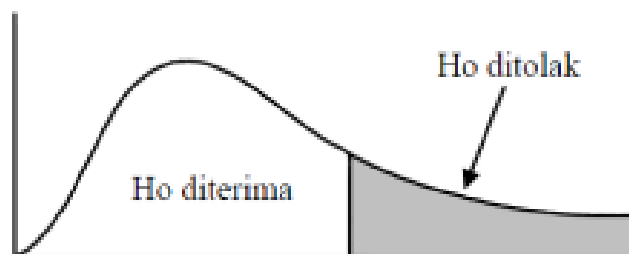
- H_0 diterima apabila: $sig > 0,05$

- H_0 ditolak apabila : $sig < 0,05$

Artinya apabila H_0 diterima, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan tidak signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya apabila H_0 ditolak menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Maka rancangan hipotesis berdasarkan Uji f (uji simultan) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_0 : $\beta_1, \beta_2 = 0$: Tidak terdapat pengaruh laba komersial dan pendapatan pajak tangguhan terhadap beban pajak.
2. H_a : $\beta_1, \beta_2 \neq 0$: Terdapat pengaruh laba komersial dan pendapatan pajak tangguhan terhadap beban pajak.



Gambar 3.3 Uji f

3.8.3 Koefisien Determinasi

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi. Analisis determinasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien

determinasi. Analisis determinasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable independen dan variable dependen.

Menurut Sugiyono (2013:231) koefisien determinasi sebagai berikut:

“Koefisien determinasi diperoleh dari koefisien korelasi pangkat dua, sebagai berikut: $Kd = R^2 \times 100 \%$ ”

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

R = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

DAFTAR PUSTAKA

- Ar dyansyah, Danis., Zulai kha. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- At maja, Lukas Setia. 2008. Teori dan Praktek Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Dj a maludin, dkk. 2008. Analisis Pengaruh Perbedaan Antara Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Akrua, Dan Arus Kas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 11
- Donald E Kieso, Jerry J, Weygandt, Terry D Warfield 2008. Akuntansi. Intermediate. Edisi 12 Jakarta: Erlangga
- Enggun Guna wan (2015, Pengaruh Laba Komersial, Pendapatan Pajak Tangguhan Terhadap Beban Pajak Di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Lentera Akuntansi, ISSN 2339-2991
- Harnanto, 2003, Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta. BPFEE- Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1. Januari 2015. Jakarta: Dewan Standar Akuntan Indonesia Gha. Akuntan
- Karayan, John E and Charles W Swenson. 2007. Strategic Business Tax Planning, 2nd edition. New Jersey: John Wiley & Sons Inc
- Kieso, Donald E, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield 2016. Intermediate Accounting IFRS Edition. Second Edition. United States: WILEY
- Nazir, Mohammad. 2012. Metode Penelitian. Jakarta: Chalia Indonesia
- Rahman Pura, 2013, Pengantar Akuntansi 1. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Richardson, Grant dan Roman Lanis. 2007. Determinants of the Variability in Corporate effective Tax Rates and Tax Reform Evidence from Australia. Journal of Accounting and Public Policy. 26 (2007) 689-704
- Rudianto, 2012, Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan. Laporan Keuangan, Penerbit : Erlangga, Jakarta

- Santoso, Singgih. 2012. Analisis SPSS pada Statistik Parametrik Jakarta: PT. Hex Media Komputindo
- Sofyan Syafri Harahap, 2008, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Stice, James D Earl K Stice, K Fred Skousen, 2008, Akuntansi Keuangan Intermediate Accounting, Edisi Keenam belas. Diterjemahkan oleh Ai Akbar, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erlly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam KR dan John, J. Wild, 2010. Analisis Laporan Keuangan, Buku Satu, Edisi Sepuluh, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta
- Sukrisno Agoes, 2014, Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta
- Suranggane, Zulaiha. 2007. Analisis Aktiva Pajak Tangguhan dan AkruaI Sebagai Prediktor Manajemen Laba: Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEJ. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.4, No. 1, Hal 77-94
- Ti muriana, T dan Mhammad, R R 2015. Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. JI AFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 1 No. 2 Tahun 2015, Hal. 12-20
- Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo, 2012, Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta
- Yulianti, 2004, Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Memprediksi. Manajemen Laba. Simposium Nasional Akuntansi VII, IAI
- Zain, Mhammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat: Jakarta
- Zain, Mhammad. 2010. Hmpunan Undang – Undang Perpajakan. PT Indeks: Jakarta
- Zakiyudin, As. 2013. Akuntansi Tingkat Dasar Dilengkapi dengan akuntansi bagi organisasi pengelola zakat. Jakarta: Mitra Wacana Media